KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Minta Mekanisme Pencairan Dana Diperjelas
Tanggal : Kamis, 05 Maret 2015
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RUMAH ASPIRASI

DPR Minta Mekanisme Pencairan Dana Diperjelas

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera membuat mekanisme tata kelola dana rumah aspirasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. Mekanisme ini sangat penting agar anggota DPR tidak tersandung masalah hukum dalam mempertanggungjawabkan dana tersebut.

DPR menerima anggaran tambahan Rp 1,635 triliun dari APBN-P 2015. Sebanyak Rp 1 triliun dialokasikan untuk 560 anggota DPR dan Rp 635 miliar bagi Sekretariat Jenderal DPR.

"Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR harus memperjelas tata cara dan teknis pencairan dana rumah aspirasi. Jangan sampai karena mekanisme teknis tidak jelas, anggota DPR di kemudian hari dipanggil-panggil (aparat penegak hukum)," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Syaifullah Tamliha saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (4/3).

Tamliha mengatakan, Fraksi PPP DPR tidak bisa menyetujui wacana dana rumah aspirasi sebesar Rp 150 juta per tahun bagi anggota DPR apabila tata kelolanya belum jelas. Menurut Tamliha, BURT harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk mengundang pakar hukum pidana, sebelum membahas alokasi anggaran tambahan tersebut dengan Kementerian Keuangan.

Dia mengatakan, anggota DPR sebenarnya dapat memanfaatkan kantor partai di daerah. "Sebagai contoh, PPP punya kantor di mana-mana. Setiap reses saya mampir untuk berbincang dengan konstituen," kata Tamliha.

Wakil Ketua BURT dari Fraksi PPP Dimyati Natakusumah mengatakan, biaya pengelolaan rumah aspirasi milik pribadi anggota DPR tidak akan diganti. Kelebihan dana pun harus dikembalikan ke kas negara.

Kebijakan PAN

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menetapkan Rumah PAN di semua daerah menjadi rumah aspirasi anggota legislatif. PAN dapat melaksanakan fungsi partai dengan baik, yakni menyerap dan mengartikulasikan aspirasi rakyat.

Penetapan ini diputuskan dalam Kongres IV PAN di Nusa Dua, Bali, Senin (2/3). Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Viva Yoga Mauladi menjelaskan, Rumah PAN adalah kantor sekretariat dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan wilayah tingkat provinsi, dan dewan pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota.

Selain sebagai sekretariat, Rumah PAN juga akan difungsikan untuk menyerap aspirasi. "Hal ini berkaitan dengan tugas kader di legislatif dan eksekutif," kata Viva.

Penggunaan Rumah PAN sebagai rumah aspirasi juga didasari pertimbangan bahwa PAN adalah rumah besar rakyat Indonesia. Sudah seharusnya Rumah PAN menjadi wahana perjuangan politik rakyat, tanpa ada sekat agama, keyakinan, adat, budaya, dan golongan.

Saat ditanya sikap Fraksi PAN terhadap alokasi APBN-P 2015 untuk rumah aspirasi, Viva mengatakan, PAN menghendaki anggaran rumah aspirasi diputuskan secara bulat oleh semua fraksi. Jika ada satu fraksi saja yang tidak sepakat, lebih baik anggaran rumah aspirasi dibatalkan.

Secara terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR Arif Wibowo mengatakan, anggaran rumah aspirasi tidak menjadi masalah. Sebab, selama ini, untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat juga dibutuhkan biaya.

Arif mengeluarkan rata-rata Rp 20 juta per bulan untuk membiayai tim menjaring aspirasi rakyat. "Apakah aspirasi ditindaklanjuti dalam program pemerintah atau tidak, itu yang juga penting," ujarnya.

(AGE/NTA)